1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Musi Banyuasin pengukuran Inflasi Kabupaten Musi Banyuasin adalah NON-IHK (Non Indek Harga Konsumen) dimana dalam menentukan inflasi mengacu pada Kotamadya Palembang . Perkembangan inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin bulan Juli, Agustus dan September sebagai berikut :

- Pada Juli 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,90.

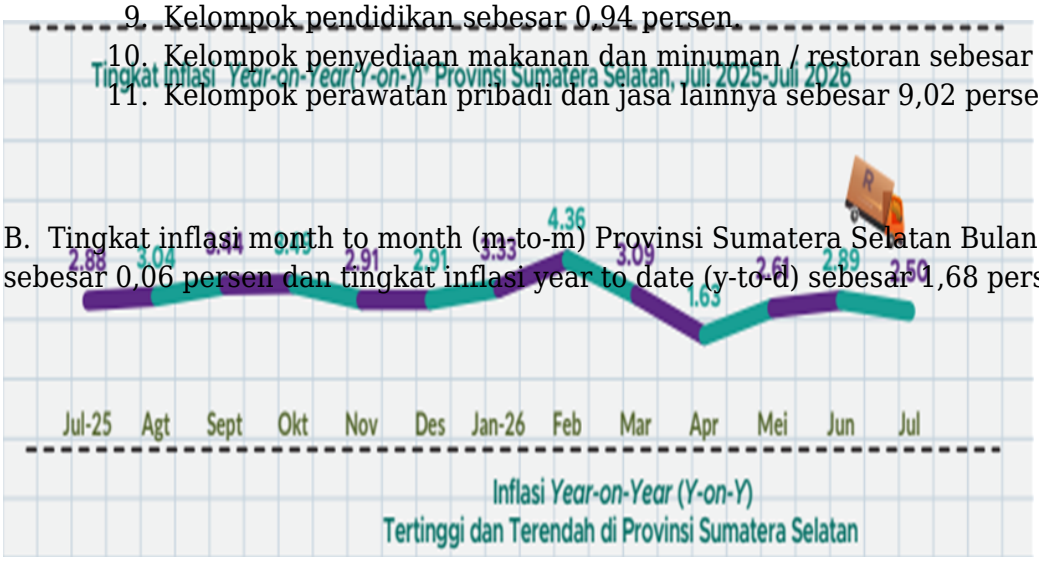
A. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu :

1. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,33 persen.
2. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,36 persen.
3. kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,80 persen.
4. kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 01,26 persen
5. Kelompok kesehatan sebesar 063 persen.
6. Kelompok transportasi sebesar 3,69 persen.
7. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,62 persen.
8. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,97 persen.
9. Kelompok pendidikan sebesar 0,88 persen.
10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,99 persen.
11. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,64 persen.

B. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Selatan Bulan Juli 2026 sebesar 0,24 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,62 persen.

- Pada Agustus 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,60 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,97.

A. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu :
    1. kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,65 persen.
    2. kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,36 persen
    3. Kelompok perumahan , air , listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,74 persen.
    4. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,26 persen
    5. Kelompok kesehatan sebesar 0,63 persen.
    6. Kelompok transportasi sebesar 3,44 persen
    7. kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,67 persen.
    8. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,05 persen.
    9. Kelompok pendidikan sebesar 0,94 persen.
    10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman / restoran sebesar 2,05 persen.
    11. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,02 persen.



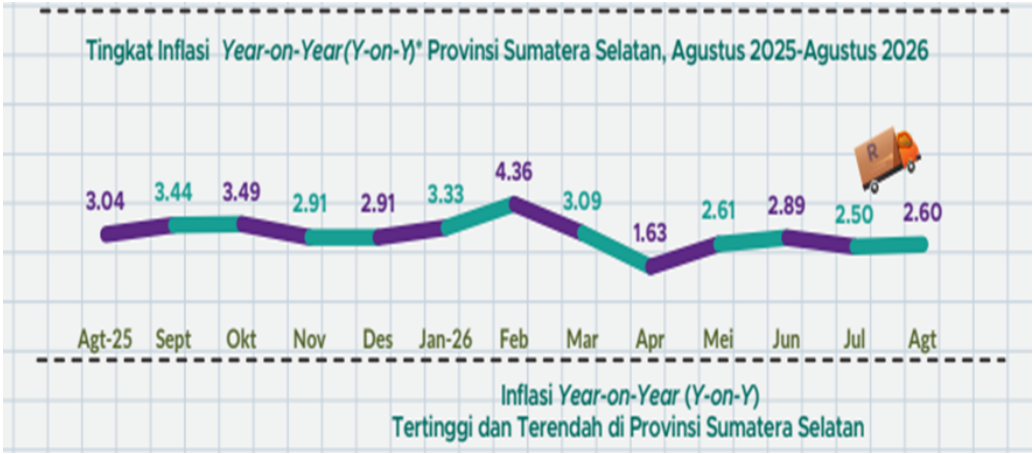
B. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Selatan Bulan Agustus 2026 sebesar 0,06 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,68 persen.

- Pada September 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,21.

A. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu :

1. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,89 persen.
2. kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,63 persen ;
3. kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,80 persen ;
4. kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,39 persen ;
5. Kelompok kesehatan sebesar 0,55 persen ;
6. Kelompok transportasi sebesar 3,56 persen ;
7. kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,64 persen ;
8. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,09 persen ;
9. Kelompok pendidikan sebesar 1,04 persen.
10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,03 persen ;
11. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,90 persen;

B. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Selatan Bulan September 2026 sebesar 0,21 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,90 persen.

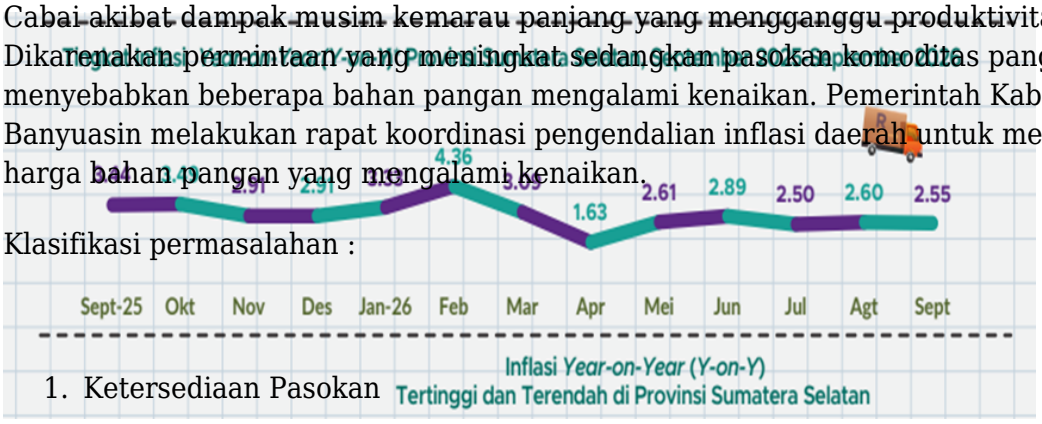


Alokasi Anggaran Penanganan Inflasi Kabupaten Musi Banyuasin

PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI		
		Rp	Keuangan %	Fisik %
Dinas Perikanan	Rp.380.000.000	Rp.0	0	0
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp.452.327.500	Rp.236.049.461	48,67	61,53
Dinas Ketahanan Pangan	Rp.212.000.000	Rp.134.334.931	63,37	85,00
Bagian Perekonomian	Rp.10.000.000	Rp. 9.996.000	99	100

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Komoditas pangan yang mengalami kenaikan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Beras dan Cabai akibat dampak musim kemarau panjang yang mengganggu produktivitas pertanian. Dikarenakan permintaan yang meningkat sedangkan pasokan komoditas pangan yang sedikit menyebabkan beberapa bahan pangan mengalami kenaikan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah untuk menindaklanjuti harga bahan pangan yang mengalami kenaikan.



Klasifikasi permasalahan :

1. Ketersediaan Pasokan

Permintaan bahan pokok meningkat menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-81 Tahun dan HUT

Musi Banyuasin ke-70 Tahun, sedangkan ketersediaan bahan pangan di pasar cenderung tidak tetap atau kurang.

2. Keterjangakauan Harga

Resiko kenaikan harga menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-81 Tahun dan HUT Musi Banyuasin ke-70 Tahun.

3. Kelancaran Distribusi

Hampir sebagian besar kebutuhan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin didatangkan dari luar daerah yang melalui jalan negara/provinsi dimana kondisi *jalan tersebut rusak* dan menghambat distribusi barang *serta adanya kenaikan BBM dari Pemerintah berdampak pada kenaikan harga.*

4. Komunikasi Efektif

Belum pahamnya sebagian masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi perlu edukasi yang terus menerus dan perlunya kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah (PD) dan dengan daerah penghasil.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah

1. Hari / Tanggal : Senin / 20 Juli 2026

   Tempat : Ruang Rapat Kopri Pemkab Muba

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara virtual. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Korpri Pemkab Muba, Senin (20/07/2026). Turut hadir dalam acara, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab.Muba Bapak Adi Manopo,S.Pd.,M.Pd serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muba yang terkait.

Dalam arahannya yang disampaikan secara virtual, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Tomsi Tohir menekankan agar daerah yang mengalami kenaikan harga segera

mencari solusi konkret. “Daerah yang alami kenaikan harus difokuskan untuk cari solusi. Jangan ditunda. Koordinasi lintas sektor harus jalan agar inflasi bisa dikendalikan,” tegas Tomsi. Juga menyoroti capaian Program 3 Juta Rumah. Ia menyebut masih banyak daerah yang *under-kuota*. “Untuk bedah rumah, banyak daerah under-kuota. Segera kirim data tambahan. Ajak BPS, minta data desil 1 dan 2. Undang BPS untuk memberikan alamat rumah desil 1/2 yang sederhana atau tidak layak huni agar tepat sasaran,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Musi Banyuasin Bapak H.M.Toha Tohet, S.H melalui Plt.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Muba, Bapak Akhmad Toyibir menyampaikan kondisi ekonomi di Musi Banyuasin. “Pada Minggu ke-3 Juli 2026, Kabupaten Muba mengalami deflasi. Faktornya daya beli menurun dan banyak konsumen belanja di tempat lain. Secara sekilas penurunan harga terdengar bagus bagi konsumen, namun jika terjadi terus-menerus, deflasi bisa berdampak buruk karena mencerminkan lesunya aktivitas ekonomi dan bisnis,” jelasnya. Terkait Program 3 Juta Rumah, Bapak Akhmad Toyibir menyatakan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus menyikapi dan melakukan mitigasi. “Untuk program pusat seperti bedah rumah, akan terus kita sikapi. Mitigasinya akan dilaporkan untuk diverifikasi dalam mencari solusi agar target tercapai dan tepat sasaran,” tutup Toyibir.

2. Hari / Tanggal : Senin / 27 Juli 2026

   Tempat : Ruang Rapat Kopri Pemkab Muba

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2026, kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (27/7/2026). Rapat Koordinasi berlangsung di Ruang Rapat Korpri Pemkab Musi Banyuasin mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memastikan distribusi energi berjalan lancar, serta mempercepat pelaksanaan program strategis nasional di sektor perumahan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Adi Manopo, M.Pd., Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Musi Banyuasin, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dalam Rapat Koordinasi tersebut, pemerintah daerah mengikuti pemaparan mengenai strategi pengendalian inflasi, evaluasi kondisi distribusi BBM di berbagai daerah, serta langkah-langkah percepatan implementasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Adi Manopo, M.Pd., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta memastikan setiap program strategis dapat berjalan efektif di

daerah. "Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pengendalian inflasi, menjaga kelancaran distribusi BBM, serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah melalui sinergi seluruh perangkat daerah," ujar Adi Manopo. Melalui rakor tersebut, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin optimal sehingga berbagai kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif demi menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Hari / Tanggal : Kamis / 30 Juli 2026

Tempat : Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan resmi mentransformasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menjadi Ekosistem Rantai Pasok Pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Transformasi tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peluncuran Pengembangan Ekosistem Rantai Pasok GSMP–Makan Bergizi Gratis (MBG) dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kota Palembang, Provinsi Sumsel, Kamis (30/7/2026). Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Bapak Cik Ujang, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Sumatra Selatan. "Jangan sampai rantai pasok pangan ini terhambat. Mari bersama-sama berkolaborasi memelihara ekosistem ini agar ketersediaan dan harga pangan tetap stabil," ujar Cik Ujang. Menurutnya, transformasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) didukung berbagai capaian positif pada sektor pangan dan ekonomi daerah. Sejak diinisiasi pada 2021, program yang semula berfokus pada pemanfaatan pekarangan rumah kini berkembang menjadi ekosistem yang menghubungkan petani, peternak, nelayan, UMKM, pesantren, perbankan, akademisi, hingga dunia usaha. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menekan angka kerawanan pangan dan kemiskinan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan, Bambang Pramono, mengatakan perekonomian Sumatra Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,34 persen (*year on year/yoy*), lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi regional Sumatra yang mencapai 5,13 persen (*yoy*). Dari sisi inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatra Selatan pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,36 persen (*month to month/mtm*), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,61 persen (*mtm*). Secara tahunan, inflasi berada di angka 2,89 persen (*yoy)* dan diproyeksikan tetap berada dalam kisaran target nasional sebesar 2,5±1 persen. "Kegiatan ini merupakan bentuk inovasi sinergi dan kolaborasi yang sangat baik. Di tengah ketidakpastian global dan tantangan cuaca seperti dampak El Nino, kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang adalah kunci," jelas Bambang. Untuk memperkuat pengendalian inflasi, Bank Indonesia merekomendasikan penerapan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Selain itu, diperkuat pula penerapan *Early Warning System* (EWS) berbasis model multivariat hasil kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatra Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mencanangkan pembentukan Forum Kolaborasi GSMP Provinsi Sumatra Selatan serta menyaksikan

penandatanganan nota kesepahaman (*MoU*) antarpelaku usaha melalui skema *Business-to-Business* (B2B) dan *Government-to-Government* (G2G) dalam penguatan rantai pasok pangan. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Pemprov Sumatra Selatan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian kepada kelompok tani dan pelaku usaha lokal guna meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah.

4. Hari / Tanggal : Senin / 10 Agustus 2026

   Tempat : Ruang Rapat Randik Pemkab Muba

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi dan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) sinkronisasi layanan pertanahan dan perpajakan, Senin (10/8/2026). Rakor virtual tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti kepala daerah se-Indonesia. Pemkab Muba mengikuti rakor dari Ruang Rapat Randik Setda Muba, dipimpin Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Musi Banyuasin Bapak Akhmad Toyibir. Menteri ATR/BPN Bapak Nusron Wahid mengatakan sinkronisasi data BPHTB dengan Nomor Induk Bidang (NIB) melalui sistem terintegrasi akan mempercepat layanan pertanahan sekaligus menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Layanan peralihan hak pertanahan ditargetkan maksimal 10 hari dan mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 di 15 kota awal. Selain pertanahan, pemerintah juga mendorong percepatan program bedah rumah. Kementerian PKP menyebut Presiden menargetkan perbaikan 400 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2026. Pengusulan bantuan kini dipermudah, termasuk alas hak yang dapat menggunakan surat keterangan RTLH dari kepala desa atau lurah. Dalam pengendalian inflasi, pemerintah pusat menyebut kondisi inflasi nasional relatif stabil. Namun, pemerintah daerah diminta mewaspadai kenaikan harga daging ayam, telur ayam, cabai merah dan cabai rawit di sejumlah daerah. Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Bapak Akhmad Toyibir mengatakan kondisi Indeks Perkembangan Harga (IPH) Muba saat ini berada pada posisi aman dan cenderung stabil. Harga kebutuhan pokok masyarakat juga relatif terkendali. “IPH Kabupaten Musi Banyuasin kini berada di tingkat tengah dan cenderung stabil. Komoditas kebutuhan pokok masyarakat relatif terjaga tanpa gejolak signifikan,” ujar Toyibir. Terkait sinkronisasi layanan pertanahan dan BPHTB, Pemkab Muba akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan menginstruksikan DPMPTSP dan Bapenda berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Muba.

5. Hari / Tanggal : Rabu / 30 September 2026

   Tempat : Hotel Emilia, Palembang

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di daerah. Pada September 2026, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan inflasi sebesar 0,21% (mtm),

meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,06% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat sebesar 2,55% (yoy), sedikit menurun dari 2,60% (yoy) pada Agustus 2026. Sedangkan tren inflasi nasional tercatat mengalami kenaikan menjadi 3,28% (yoy) dari sebelumnya 3,19% (yoy). Capaian pengendalian inflasi tersebut menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi tahunan (yoy) dan bulanan (mtm) yang relatif terkendali secara baik di Regional Sumatera maupun Nasional. Secara bulanan, inflasi terutama didorong oleh peningkatan harga sejumlah komoditas utama, antara lain beras (0,14%), cabai merah (0,09%), cabai rawit (0,03%), telur ayam ras (0,01%), dan pisang (0,01%). Kenaikan harga beras terjadi seiring meningkatnya harga di tingkat produsen serta distributor yang dipengaruhi kenaikan harga gabah dampak dari stok bahan baku di penggilingan yang semakin terbatas dan kenaikan biaya pengemasan. Adapun kenaikan harga komoditas hortikultura merupakan dampak dari musim kemarau berkepanjangan yang menekan produktivitas. Selanjutnya, kenaikan harga telur ayam ras utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya biaya pakan. Memasuki Oktober 2026, tekanan inflasi diprakirakan akan cenderung meningkat, antara lain dipengaruhi oleh potensi gangguan pasokan pangan hortikultura imbas El Nino yang menyebabkan kondisi kemarau yang lebih panjang dan curah hujan yang diprakirakan berada di bawah normal. Selain itu, tekanan harga daging ayam ras diprakirakan masih berlanjut seiring perkembangan biaya pakan dan permintaan pangan. Harga minyak goreng juga berpotensi meningkat seiring kenaikan harga CPO global yang didorong oleh peningkatan permintaan bahan baku untuk implementasi program biodiesel B50. Mengantisipasi berbagai risiko tersebut, untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hingga akhir September 2026, telah dilaksanakan lebih dari 493 kegiatan operasi pasar murah/GPM/SPHP di berbagai wilayah Sumatera Selatan, serta puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi. Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan hingga September 2026, BI Sumsel telah memberikan fasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai kurang lebih 47,92 ton guna mendukung kegiatan OPM di Provinsi Sumatera Selatan. “BI Sumsel mencatat total pembelian komoditas bawang merah secara B2B dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah sebanyak 23,02 ton dan komoditas cabai dari Kab. Magelang sebanyak 38,29 ton untuk turut membantu meningkatkan ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan,” kata dia. Hingga September 2026, tercatat telah dilakukan penambahan MoU (Memorandum of Understanding) KAD yang dilakukan antara Pemda di Sumatera Selatan dengan Pemda Jawa Tengah berupa 8 KSB (Kesepakatan Bersama) dan 21 PKS (Perjanjian Kerja Sama) untuk G2G (Government to Government). “Sementara MoU B2B (Business to Business) sebanyak 4 PKS dengan penguatan koordinasi yang dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, seperti Rapat Koordinasi TPIP–TPID secara rutin dan berbagai komunikasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi seperti iklan layanan masyarakat bijak belanja dan publikasi jadwal OPM di berbagai kanal media,” imbuh dia. Menurut Bambang, Sinergi dan koordinasi dengan TPID antar wilayah juga terus dilakukan, antara lain studi tiru TPID Sumsel bersama dengan TPID Sulawesi Selatan kepada TPID Jawa Tengah, dalam rangka mempelajari inovasi pengendalian inflasi berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan daerah juga didorong melalui berbagai program inovatif seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang pada tahun ini telah secara resmi ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP untuk

mendukung PSN melalui kolaborasi berbagai pihak seperti di antaranya pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan yang didukung melalui pelaksanaan business matching dengan offtaker dan finance matching dengan perbankan untuk peningkatan kapasitas produksi melalui kredit usaha. Pesantren dianggap memiliki potensi untuk dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar ketahanan pangan. Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

1. **KETERSEDIAAN PASOKAN**

1. Apresiasi Usaha Ketahanan Pangan Desa di Bayung Lencir, Peternakan ayam petelur dan budidaya ikan patin dikembangkan sebagai usaha bersama untuk meningkatkan ekonomi desa.

Bupati Muba Apresiasi Usaha Ketahanan Pangan Desa di Bayung Lencir. Peternakan ayam petelur dan budidaya ikan patin dikembangkan sebagai usaha bersama untuk meningkatkan ekonomi desa. Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Bayung Lencir, Kamis (27/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau sejumlah kegiatan usaha desa yang dikembangkan melalui program ketahanan pangan. Kunjungan diawali dengan meninjau usaha peternakan ayam petelur di Desa Sukajaya. Usaha tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang dikelola PT Baylen Keren Sarana, unit usaha Bumdesma Baylen Keren LKD. Program tersebut merupakan usaha bersama yang sumber dananya berasal dari penyertaan modal khusus program ketahanan pangan tahun 2025. Penyertaan modal itu melibatkan 10 desa, yakni Muara Bahar, Mendis Jaya, Lubuk Harjo, Muara Medak, Pagar Desa, Pangkalan Bayat, Simpang Bayat, Bayat Ilir, Pulai Gading, dan Sindang Marga. Dari Desa Sukajaya, Bupati Muba melanjutkan kunjungan ke Desa Mekar Jaya untuk melihat langsung kegiatan budidaya ikan patin yang dikelola BUMDes Tapal Batas. Bupati Muba mengapresiasi berbagai usaha yang telah dikembangkan desa-desa di Kecamatan Bayung Lencir. Menurut dia, pengelolaan potensi desa melalui usaha produktif dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan desa. “Ini merupakan usaha yang sangat baik. Kita berharap kegiatan seperti ini terus berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Toha. Pengembangan usaha desa juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian desa dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, yakni Muba Maju Lebih Cepat Bersama Mensejahterakan Musi Banyuasin. Kunjungan Bupati bersama jajaran Pemkab Muba disambut hangat para pengurus usaha ketahanan pangan. Direktur BUMDes Tapal Batas Desa Mekar Jaya, Herry, menyampaikan terima kasih atas perhatian Bupati dan jajaran Pemkab Muba. Menurut Herry, kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi para pengurus untuk terus mengembangkan usaha ketahanan pangan di desanya. Ia juga menyampaikan kebutuhan mesin pakan kepada Bupati Muba agar pengelolaan budidaya ikan dapat berjalan lebih

maksimal dan berkelanjutan. “Kami berterima kasih atas kunjungan dan perhatian Bapak Bupati. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan usaha. Kami juga berharap dapat dibantu mesin pakan agar usaha ketahanan pangan ini bisa lebih maksimal dan berkelanjutan,” kata Herry.

2. **KETERJANGKAUAN HARGA**

1. Pemantauan Harga

Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Ketahanan Pangan memantau harga secara harian dengan sample 4 (empat) Pasar yaitu : Pasar Randik Sekayu, Pasar Babat Toman, Pasar Sungai Lilin dan Pasar Bayung Lencir, kemudian dilaporkan ke Aplikasi SP2KP Kementerian Perdagangan setiap hari sampai pukul 11.00 WIB diteruskan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk pelaopran melalui Aplikasi Irjen Kemendagri yang dilaporkan setiap hari oleh Inspektorat sampai dengan pukul 15.00 WIB.

1. Menjaga Pasokan bahan pokok dan barang penting

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Bekerjasama dengan Perum Bulog Drive Sumsel dalam melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar dengan rincian sebagai berikut :

1. Hari / Tanggal : Kamis / 09 Juli 2026

   Tempat : Halaman Kantor Camat Sungai Keruh

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian kembali menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Kali ini, kegiatan berlangsung Kecamatan Sungai Keruh dan menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) di seluruh kecamatan. Bupati Muba H M Toha Tohet SH yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Bapak H.Akhmad Toyibir,S.STP.,MM mengajak masyarakat, khususnya warga Kecamatan Sungai Keruh untuk memanfaatkan program tersebut sebaik-baiknya. Menurutnya, Operasi Pasar Murah (OPM) diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan beras sebagai bahan pangan utama. "Kami berharap kegiatan operasi pasar murah ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Semoga program ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok dan meringankan beban ekonomi masyarakat," ujarnya saat membuka Operasi Pasar Murah (OPM) di Halaman Kantor Camat Sungai Keruh, Kamis (9/7/2026). Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Muba Bapak Hendra Tris Tomy,S.STP.,M.Ec.Dev diwakili Sekretaris Bapak Drs.Nwardi Endang,M.Si menjelaskan, Operasi Pasar Murah (OPM) di Sungai Keruh menyediakan paket kebutuhan pokok berupa Beras SPHP kemasan 5 kilogram, Gula Pasir kemasan 1 kilogram,

serta Gas LPG 3 kilogram. Pada kegiatan ini disiapkan beras SPHP sebanyak 6 ton dari Perum Bulog, Gula Pasir sebanyak 1,2 ton, dan 250 Tabung Gas LPG 3 kilogram. "Harga paket yang ditetapkan Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel sebesar Rp.78.000. Berkat subsidi Rp.10.000 dari Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu, masyarakat dapat memperoleh paket tersebut dengan harga Rp.68.000. Sementara itu, gas LPG 3 kilogram dijual dengan harga Rp.21.000 per tabung," tutur Nwardi. Sementara itu, Camat Sungai Keruh Bapak Henri,S.Pd.,MSi mengucapkan terima kasih kepada Bupati Musi Banyuasin dan seluruh pihak yang telah menghadirkan Operasi Pasar Murah (OPM) di wilayahnya. Dikatakannya, program tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. "Sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin juga telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kecamatan Sungai Keruh. Karena itu, kami berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih sering sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi sekaligus mendukung visi Pak Bupati Musi Banyuasin dalam mewujudkan Muba Maju Lebih Cepat," pungkasnya. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan subsidi secara simbolis oleh Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu Bapak Irwan Antoni, kepada Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin sebagai bentuk dukungan dunia perbankan terhadap pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) di Kabupaten Muba.

2. Hari / Tanggal : Rabu / 15 Juli 2026

   Tempat : Halaman Kantor Camat Lawang Wetan

Gerakan Pangan Murah (GPM) kembali diadakan Pemerintah Kabupaten di bawah kepemimpinan Bupati Musi Banyuasin Bapak H.M.Toha Tohet,S.H dan Wakil Bupati Bapak Abdur Rohman Husein. Kali ini, gerakan pangan murah dipusatkan di halaman Kantor Camat Lawang Wetan, Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilisasi harga, pengelolaan permintaan, menjaga kelancaran distribusi serta menjamin ketersediaan. Acara ini merupakan kolaborasi strategis antara Dinas Ketahanan Pangan Kab. Muba, PT Muba Energi Maju Berjaya, Perum Bulog dan Bank Sumsel Babel. Plt.Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Muba Bapak Frans Gustian,ST.,M.Si mengatakan, gerakan pangan murah kali ini menyasar masyarakat di Kecamatan Lawang Wetan, dengan menargetkan pengendalian inflasi harga pada beberapa komoditas terutama harga besar yang semakin melambung tinggi. “Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa memanfaatkan momentum ini untuk berbelanja barang kebutuhan pokok dengan harga relatif terjangkau dan efisien. Sehingga beban masyarakat pun bisa lebih ringan,” Gerakan Pangan Murah (GPM) ini sangat di dukung penuh oleh Bupati Musi Banyuasin Bapak H.M.Toha Tohet,S.H dan Wakil Bupati Bapak Abdur Rohman Husein. Dimana Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk hadir di tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, serta memastikan kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau karena kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat, meningkatkan daya beli, dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga Kecamatan Lawang Wetan. ”Sepanjang tahun 2026 BSB mendukung pelaksanaan program ini sebanyak 10 kali, sedangkan PT Muba Energi Maju Berjaya telah berkontribusi dalam 4 kali kegiatan. Ditempat yang sama, Kabid Distribusi dan Cadangan

Pangan Bapak H.M.Febriansyah,S.T.,MM menambahkan, untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah hari ini, total subsidi yang diberikan sebesar Rp.18.000.000 untuk 1.200 paket. “Total itu berasal dari subsidi CSR Bank Sumsel Babel sebesar Rp.10.000 bagi 1.200 paket atau Rp.12.000.000 untuk 1 kali pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan dari PT.Muba Energi Maju Berjaya sebesar Rp.5.000 bagi 1.200 paket atau Rp.6.000.000,” Dalam kegiatan ini, disediakan sebanyak 1.200 paket bahan pangan terdiri dari 6 ton beras SPHP kemasan 5 kilogram dan 1.200 kilogram tepung terigu 1 kilogram. “Dapat di informasikan juga bahwa harga jual dari Perum Bulog Rp.74.000. Karena disubsidi oleh BSB dan BUMD Muba sebesar Rp.15.000 jadi masyarakat cukup membayar Rp.59.000 saja”. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus bersinergi dengan Bulog, BUMD, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar program seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Musi Banyuasin demi terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat menuju Muba Maju Lebih Cepat.

3. Hari / Tanggal : Kamis / 06 Agustus 2026

Tempat : Halaman Kantor Camat Plakat Tinggi

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin bekerjasama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Regional Sumsel dan Babel dan Bank SumselBabel Cabang Sekayu, PT. Pertamina Patra Niaga melalui Agen PT. Klantan Sakti Utama selaku Agen Gas LPG 3 Kg. Kali ini, melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) di halaman Kantor Kecamatan Plakat Tinggi, Kamis (06/08/2026) sebagai bagian dari program pengendalian inflasi daerah dan stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026. Komoditi barang kebutuhan pokok yang dijual adalah Beras SPHP dan Gula Pasir Kemasan merk Rose Brand dan Gas LPG Tabung 3 Kg. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah di halaman kantor Kecamatan Plakat Tinggi ini merupakan penyelenggaraan yang keempat kali untuk tahun 2026, Operasi Pasar Murah sebelumnya telah dilaksanakan di Kecamatan Batang Hari Leko dan Lawang Wetan dan Sungai Keruh. Acara dibuka oleh Bupati Musi Banyuasin yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan (H. Akhmad Toybir, S.STP.,MM). Pada kesempatan ini, beliau menyampaikan “bahwa operasi pasar ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memberikan solusi langsung kepada masyarakat dalam pemenuhan sembako murah, gas LPG 3 Kg dan menjamin keamanan ketersediaan dan stok barang kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mengupayakan agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan cukup dan harga yang terkendali melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait”. Pada pelaksanaan Operasi Pasar Murah di halaman kantor Kecamatan Keruh ini dihadiri oleh tamu dan undangan antara lain unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Musi Banyuasin, Forkompinda Kab. Musi Banyuasin, Direktur Bank SumselBabel Cabang Sekayu, Dirtek PDAM Tirta Randik Sekayu, Forkopimcam Plakat Tinggi, para Kepala Desa, dan masyarakat dalam wilayah Kecamatan Plakat Tinggi. Adapun komoditas pada pelaksanaan Operasi Pasar Murah pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2026 terdiri dari Beras SPHP dan Gula Pasir merk “Rose Brand” serta gas LPG tabung 3 Kg sebanyak :

No.	Nama Komoditi	Satuan	Jumlah	Total	Harga per paket

1.	Beras SPHP	5 Kg	1.200	6.000 Kg	Rp. 68.000,-
2.	Gula Pasir merk “Rose Brand”	1 Kg	1.200	1.200 Kg	
3.	Gas LPG Tabung 3 Kg	Tabung	560	560 Tabung	Rp. 22.000,-

Sebanyak 1.200 paket sembako dan 560 Tabung gas LPG Kg yang diperuntukkan pada masyarakat Kecamatan Plakat Tinggi saat pelaksanaan Operasi Pasar Murah kali ini. Masyarakat dapat membeli satu paket seharga Rp. 68.000,- yang terdiri dari 5 Kg beras SPHP dan 1 Kg Gula Pasir. Harga komoditas sembako dari Bulog Kanwil Regional Sumsel dan Babel adalah Rp. 78.000,- per paket, namun karena adanya subsidi sebesar Rp. 10.000,- dari Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu Rp. 10.000,- per paket, sehingga masyarakat hanya membayar Rp. 68.000,- saja per paket. Sedangkan gas LPG Tabung Kg dijual Rp. 22.000,- per tabung. Kondisi terkini untuk harga di pasaran ketetapan pemerintah untuk komoditas pangan pokok adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp. 13.900,- per Kilogram, beras medium sebesar Rp. 12.500,- per Kilogram dan Gas LPG Tabung 3 Kg harga eceran dimasyarakat di luar pangkalan rata-rata Rp. 30.000,- per tabung untuk di Kecamatan Plakat Tinggi khususnya di Desa Sido Rahayu.

4. Hari / Tanggal : Selasa / 29 September 2026

   Tempat : Halaman Kantor Camat Sekayu

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara resmi menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) Sembako dan Gas LPG 3 Kilogram yang dipusatkan di halaman Kantor Camat Sekayu pada Selasa (29/09/2026). Kegiatan strategis ini dilaksanakan tidak hanya sebagai rangkaian dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-70 tahun 2026, tetapi juga sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam merespons gejolak ekonomi serta mengendalikan angka inflasi daerah. Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba, Bapak Akhmad Toyibir,S.STP.,M.M., yang hadir mewakili Bupati Musi Banyuasin. Turut hadir mendampingi dalam kegiatan ini sejumlah perwakilan unsur Forkopimda, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Frans Gustian,ST.,M.Si., Camat Sekayu Bapak Edi Heryanto,S.H.,M.Si., Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bapak Nwardi Endang, perwakilan Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel Sekayu, Direktur Keuangan PT.Muba Energi Maju Berjaya (MEMB) Bapak Fery Antoni Kurniawan,S.H., perwakilan Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel, serta para perwakilan jajaran OPD terkait. Dalam sambutannya, Bupati Musi Banyuasin Bapak H.M. Toha Tohet yang diwakili oleh Bapak Akhmad Toyibir, menegaskan bahwa pelaksanaan operasi pasar ini merupakan langkah intervensi krusial pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Pemerintah daerah menyoroti adanya peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dalam tiga pekan terakhir di Sumatera Selatan, terutama pada komoditas beras dan cabai akibat dampak musim kemarau panjang yang mengganggu produktivitas pertanian. "Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya agar kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap tersedia cukup dengan harga yang terkendali. Melalui sinergi dan kolaborasi erat bersama BUMD, perbankan, serta BUMN, kita hadir di tengah masyarakat untuk

mengintervensi kenaikan harga serta meringankan beban ekonomi warga," ujar Akhmad Toyibir saat membacakan amanat Bupati. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) ini terwujud atas kerja sama lintas sektor antara Disdagperin Muba, Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu, PT.Muba Energi Maju Berjaya, serta PT.Pertamina Patra Niaga Sumbagsel melalui agen PT.Pratama Mulia Abadi. Dalam operasionalnya, Perum Bulog mengucurkan sebanyak 6 ton beras SPHP kemasan 5 kg dan 1,2 ton (1.200 liter) Minyak Kita. Paket sembako (beras dan minyak goreng) yang semula dibanderol dengan harga normal Rp.75.000 mendapatkan subsidi silang sebesar Rp.15.000 yang ditopang oleh Bank Sumsel Babel sebesar Rp.10.000 dan PT.MEMB sebesar Rp.5.000. Dengan subsidi tersebut, masyarakat cukup membayar Rp.60.000 per paket. Selain itu, disalurkan pula 560 tabung gas LPG 3 kg dengan harga HET Rp.20.000 per tabung. Guna memberikan manfaat yang optimal bagi warga, momentum ini juga diintegrasikan dengan berbagai pelayanan publik gratis di tempat. Masyarakat Kecamatan Sekayu yang hadir tidak hanya dapat berbelanja bahan pokok murah, tetapi juga memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, pelayanan KB gratis oleh DPPKB Kabupaten Musi Banyuasin serta layanan jemput bola Administrasi Kependudukan dan Gerakan Cepat (Gercep) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap program kolaboratif ini dapat terus berlanjut dan jangkauannya diperluas ke seluruh kecamatan di wilayah Musi Banyuasin guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan angka inflasi secara berkelanjutan.

3. **KELANCARAN DISTRIBUSI DAN KOMUNIKASI EFEKTIF**

1. Komunikasi Efektif
2. Whatsapp Group TPID Nasional
3. Whatsapp Group TPID Provinsi Sumatera Selatan
4. Whatsapp Group TPID Kabupaten Musi Banyuasin
5. Whatsapp Group Pengendalian Indflasi BPKP Sumsel
6. Rapat Koordinasi Nasional Pengendalan Inflasi TPID se Indonesia Via Daring dengan Kemendagri setiap hari senin.
7. Rapat Capacity Building TPID se Prov. Sumatera Selatan yang diinisisi Sekretariat TPID Provinsi Sumatera Selatan (Biro Ekonomi).
8. Rapat Teknis TPID Kabupaten Musi Banyuasin yang di pimpin oleh Kepala Daerah.
9. Surat Edaran Gerakan Menanam yang di umumkan melalui Website Pemkab Muba, Media Sosial, Whatsapp serta pengumuman Offline lainnya.

b). Berkoordinasi dengan Daerah Penghasil Daerah penghasil untuk kelancaran komoditas.

Melalui Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah mengadakan MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
d. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (penandatanganan Mou masih menunggu jadwal Kepala Daerah).
e. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci (penandatanganan Mou masih menunggu jadwal Kepala Daerah).
f. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Kota Pagar Alam (penandatanganan Mou masih menunggu jadwal Kepala Daerah).
g. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (penandatanganan Mou masih menunggu jadwal Kepala Daerah).
h. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (penandatanganan Mou masih menunggu jadwal Kepala Daerah).

c). Dukungan Transportasi dari APBD

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warganya. Memfasilitasi program mudik gratis bagi warga dan mahasiswa perantau menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Inisiatif ini bertujuan memastikan masyarakat dapat merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Program Mudik Gratis Muba ini menyediakan berbagai moda transportasi untuk mengangkut pemudik dari perantauan di Pulau Jawa menuju Sekayu. Sebanyak 7 (tujuh) unit Bus dengan total penumpang yang akan diberangkatkan mencapai 283 orang dan 2 (dua) unit *Speed Boat* dengan kapasitas sekitar 80 penumpang disiapkan untuk kelancaran perjalanan. Program Mudik Gratis Muba ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan bagi para perantau. Ini sekaligus mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Daerah dan warganya. Inisiatif ini menjadi agenda rutin yang dinantikan setiap tahunnya untuk mendukung mobilitas masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Muba, Bapak M. Hatta, menjelaskan bahwa prioritas diberikan kepada mahasiswa yang memiliki KTP Musi Banyuasin. Selain transportasi, para pemudik juga mendapatkan fasilitas makan sahur dan berbuka puasa gratis selama perjalanan panjang. Ini tentu sangat membantu di bulan Ramadhan.

Sebanyak 4 (empat) unit bus diberangkatkan dari rute Yogyakarta–Lampung–Sekayu pada pukul 07.30 WIB. Rute ini mengangkut sekitar 166 orang penumpang yang antusias untuk kembali ke Muba. Perjalanan panjang ini akan ditempuh dengan fasilitas yang memadai, termasuk makan sahur dan berbuka puasa gratis. Sementara itu, sebanyak 3 (tiga) bus lainnya berangkat dari rute Bandung–Jakarta–Sekayu pada pukul 12.00 WIB. Rute kedua ini membawa sekitar 117 orang penumpang yang juga merupakan warga dan mahasiswa asal Muba. Semua bus dipastikan dalam kondisi prima sebelum keberangkatan, demi keselamatan para pemudik.

Tidak hanya bus, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinjuga menyiapkan 2 (dua) unit

Speed Boat untuk mengangkut mahasiswa yang akan pulang ke wilayah Kecamatan Lalan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah yang mungkin sulit diakses melalui jalur darat. Kapasitas *speed boat* ini sekitar 80 penumpang. Keberangkatan *speed boat* dijadwalkan pada Senin sekitar pukul 12.00 WIB dari Asrama Haji Palembang menuju Dermaga PU. Dengan adanya fasilitas jalur air ini, diharapkan lebih banyak mahasiswa dapat merasakan kemudahan pulang kampung. Program ini mencerminkan upaya menyeluruh Pemkab Muba dalam melayani warganya.

Sebanyak 60 warga dilepas secara resmi untuk pulang ke kampung halaman dalam program mudik gratis. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat Musi 2026 yang digelar Polres Musi Banyuasin. Rute perjalanan meliputi Sekayu menuju Palembang dan Sekayu menuju Lubuklinggau. Armada tersebut disiapkan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan para pemudik. Kapolres mengimbau pemudik untuk mematuhi aturan selama perjalanan. Masyarakat juga diminta tidak melawan arus demi menjaga keselamatan bersama.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Dampak kebijakan yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan inflasi :

    Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan berbagai kegiatan pengendalian inflasi pada Triwulan 3 menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-81 Tahun dan HUT Musi Banyuasin ke-70 Tahun diantaranya melakukan Operasi pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dari beberapa kegiatan yang telah di lakukan dapat mengendalikan harga Beras dan Cabai serta bahan pokok lainnya dipasar dan meringankan beban ekonomi masyarakat serta dapat memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat.

    2. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan yaitu : 1. Pada saat melakukan sidak pasar dan distributor ke Kecamatan pedagang di pasar tersebut belum jujur menyampaikan harga yang sesungguhnya di jual di pasar dan pedagang toko sembako juga tidak ingin memberikan keterangan terkait harga sembako di pasaran. 2. Triwulan ke III Tahun 2026 pelaksanaan kegiatan Operasi pasar sebanyak 3 (tiga) kali dan Gerakan Pangan sebanyak 1 (satu) kali.
    3. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan, kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin pada Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

    1. Mengiatkan kegiatan Rapat Koordinasi / *Focus Group Dicussion / High Level Meeting* baik tingkat Kabupaten / Kota, Provinsi mupun Pusat.
    2. Optimalisasi kerjasama antar daerah yang dilakukan dengan cara menyuplai pasokan ke daerah – daerah defisit, dari daerah surpus.